

PENGGUNAAN FAKTOR AGAMA OLEH PEMERINTAH INDONESIA DALAM UPAYA PEMBEBASAN SANDERA ANAK BUAH KAPAL PANDU BRAHMA 12 DI FILIPINA TAHUN 2016

Ni Made Wiwin Sutaryani¹⁾. Idin Fasisaka²⁾. Adi P. Suwecawangsa³⁾

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: wiwinsutha@gmail.com¹⁾. idinfasisaka@yahoo.co.id²⁾. adisuwecawangsa@yahoo.co.id³⁾

ABSTRACT

The hostage of Indonesian citizens which conducted by the Abu Sayyaf group was closely related to the coal export by Indonesia to the Philippine as the main source in fulfilling energy. The hostage was taking occurred in the water of Sulu on March 25, 2016 involves 10 crews of tugboat Pandu Brahma 12 which departed from south Kalimantan to the Philippine on March 15, 2016. In this case the parties of the hostage-taker asked for ransom of 50 million pesos or equivalent with 15 milliard rupiahs and the hostages were taken to its hideout in the Sulu archipelago. At first, the company of tugboat Pandu Brahma 12 has prepared the money for ransom but the Ministry of Foreign Affair of Indonesia, Retno Marsudi decided to take the diplomatic way which use religion as the factor to divest the hostages by sending the negotiator teams. This is done based on the similarity of cultures and values, especially religion between Indonesia and the southern of Philippine.

Keywords : *hostage, tugboat Pandu Brahma 12, Abu Sayyaf group, negotiator team.*

1. PENDAHULUAN

Penyanderaan warga negara Indonesia yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf berkaitan erat dengan kegiatan ekspor batu bara yang dilakukan Indonesia kepada Filipina sebagai sumber utama dalam pemenuhan energi. Kejadian penyanderaan anak buah kapal (ABK) warga negara Indonesia pada 25 Maret 2016 terjadi di perairan Tambulian, lepas pantai pulau Tapul, Kepulauan Sulu, Filipina yang melibatkan 10 WNI sebagai ABK di kapal Pandu Brahma 12 yang bertolak dari Kalimantan Selatan ke Filipina pada tanggal 15 Maret 2016. Pada kasus ini, pihak penyandera yakni kelompok

Abu Sayyaf meminta uang tebusan sebesar 50 juta peso atau setara dengan kurang lebih 15 miliar rupiah dan para sandera dibawa ke tempat persembunyiannya di Kepulauan Sulu (Natgeo, 2016).

Pada awalnya, pemerintah Indonesia telah menyiapkan pasukan militer TNI untuk melakukan pembebasan ke Filipina Selatan dan perusahaan yang menaungi kerja para sandera telah menyiapkan uang tebusan, namun Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memilih untuk melakukan upaya pembebasan melalui jalur-jalur diplomatis dengan pengiriman tim negosiator.

Pengiriman negosiator yang merupakan tokoh agama ke Filipina Selatan dinilai sebagai upaya yang efektif dan efisien dilakukan dibandingkan dengan menggunakan pendekatan militer atau membayar uang tebusan, karena dalam hal ini Indonesia dan Filipina Selatan memiliki kultur yang sama. Hal ini terkait pula pada perbedaan perlakuan yang diterima oleh sandera WNI dan sandera WNA yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf. Bersamaan dengan penyanderaan yang dialami oleh ABK asal Indonesia, terdapat pula penyanderaan warga negara Kanada namun dengan lokasi pengekangan yang berbeda. Selama para ABK disandera, kelompok Abu Sayyaf tidak melakukan tindakan yang dapat menyakiti para sandera tersebut, namun pada saat hari penentuan terakhir uang tebusan dibayarkan, kelompok Abu Sayyaf mengatakan pada para sandera ABK bahwa akan mengeksekusi sandera yang berasal dari Kanada (Wicaksono & Dono, 2016). Hingga pada akhirnya pada tanggal 25 April 2016, John Ridsel (68 tahun) yakni seorang sandera yang berasal dari Kanada dipenggal kepalanya oleh kelompok Abu Sayyaf karena tidak kunjung membayar tebusan sebesar 105 miliar rupiah yang telah ditahan sejak September 2015 (Siswoyo, 2016). Hal inilah yang dianggap oleh pemerintah Indonesia sebagai peluang untuk melakukan pembebasan dengan cara-cara diplomatis yakni melalui pendekatan kultural.

Persamaan kultur yang dimiliki oleh Indonesia dan Filipina Selatan dapat

dijelaskan melalui pemikiran Samuel P. Huntington yang menempatkan Indonesia dan Filipina Selatan sebagai satu peradaban yang sama karena memiliki kultur yang sama, khususnya memiliki agama yang sama yakni sebagai peradaban Islam. Indonesia merupakan negara multikultural dengan mayoritas Muslim di dalamnya, sedangkan Filipina adalah negara bekas jajahan Spanyol yang memiliki peradaban Barat (*western*). Namun Filipina Selatan memiliki peradaban yang berbeda dari negara bekas penjajahnya karena pada tempat asal kelompok Abu Sayyaf tersebut, terdapat Bangsa Moro yang menganut agama Islam dan telah ada sebelum masa kolonialisme terjadi (Banlaoi, 2008, p. 7).

Adanya persamaan kultur dan agama yang dimiliki kedua pihak yang terlibat menjadikan upaya pembebasan sandera oleh pemerintah Indonesia yakni negosiasi pada pihak kelompok Abu Sayyaf menjadi lebih mudah untuk dilakukan. Dalam sebuah konflik yang melibatkan dua negara atau lebih yang memiliki persamaan kultur dan peradaban, maka berlaku proses resolusi konflik yang lebih mudah untuk dilakukan. Menurut Ashmore dan Jussim, satu sumber tatanan politik internasional adalah identitas. Lebih luas lagi, identitas mengacu pada aspek kognitif, sosiologi, emosi dan aspek *nontangible* lain pada suatu negara yang mendasari peran sebuah negara dalam hubungan internasional (Ashmore & Jussim, 1997). Dalam hal ini, identitas internasional

sama dengan kesamaan pemahaman antarnegara—intersubjektivitas—mengenai situasi relatif suatu negara terhadap negara lain yang dapat membentuk ekspektasi atau harapan yang sama (Wendt, 1999).

2. KAJIAN PUSTAKA

Penelitian ini menggunakan 2 tulisan sebagai kajian pustaka yang berkaitan dengan penggunaan diplomasi agama oleh pemerintah Indonesia dalam upaya pembebasan sandera anak buah kapal *Pandu Brahma 12* di Filipina tahun 2016 yakni tulisan dengan topik tentang penggunaan faktor agama dalam kebijakan luar negeri untuk mencapai kepentingan nasional suatu negara, adapun tulisan tersebut adalah tulisan dari Ghita Tadlaoui dengan judul *Morocco's Religious Diplomacy in Africa* dan tulisan dari Alicja Curanovic dengan judul *The Religious Diplomacy of the Russian Federation*.

Morocco's Religious Diplomacy in Africa merupakan tulisan yang menjadi kajian pustaka pertama dalam penelitian ini. Tulisan yang dipublikasikan pada Februari 2015 oleh penulisnya yakni Ghita Tadloui mengangkat topik penggunaan diplomasi agama oleh kerajaan Morocco di Afrika. Setelah bertahun-tahun terisolasi dari seluruh wilayah di benua Afrika, Morocco telah berupaya untuk menunjukkan eksistensinya di Afrika Barat dengan menggunakan diplomasi agama. Selain untuk menunjukkan eksistensi, pemerintah kerajaan juga mengupayakan peningkatan perekonomian melalui kerjasama dengan Sub-Saharan Africa dan sekarang

sedang mencoba memposisikan diri sebagai penghubung untuk memasuki bagian dari Benua Afrika dan untuk investor asing (Tadloui, 2015).

Kesamaan tulisan ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah adanya penggunaan agama dalam kebijakan luar negeri untuk mencapai tujuan nasional. Tujuan Morocco melakukan diplomasi agama adalah untuk membantu kerajaan dalam upaya membentuk kontribusi yang lebih kuat dalam menghadapi tantangan keamanan transnasional, mengubah keadaan ekonomi, menentukan ulang posisinya dalam geopolitik dan meningkatkan profil dalam hubungan dengan aliansi bangsa barat karena Morocco masih sangat bergantung dalam bidang ekonomi dan keamanan.

Selanjutnya disebutkan bahwa diplomasi agama yang dilakukan oleh Morocco termasuk legitimasi sang raja sebagai pimpinan keagamaan di Afrika Barat telah menjadi aspek penting dalam suksesnya strategi regional tersebut. Hal ini disebutkan dapat membawa keuntungan bagi kepentingan Amerika Serikat dan Uni Eropa dalam berbagai aspek. Contohnya adalah jika Morocco dijadikan sebagai penghubung untuk pertumbuhan Afrika, maka Morocco dapat dijadikan sebagai fasilitator untuk Amerika Serikat dan Uni Eropa dalam bidang investasi utamanya adalah investor dari Uni Eropa yang memiliki hubungan istimewa dengan pihak kerajaan.

Selain itu, bentuk keberhasilan dari diplomasi agama dalam mencapai tujuan

nasional Morocco adalah dengan berjalannya promosi “*religious moderation*” dan peningkatan kerjasama keamanan di Afrika Utara dan Afrika Barat. Disebutkan pula bahwa melalui diplomasi agama dan strategi regional ini, Marocco mampu menjadi negara terbaik dalam penanganan terorisme (*counter terrorism*) dibandingkan negara-negara di kawasan regionalnya.

Tulisan kedua dengan topik yang sama adalah tulisan dari Alicja Curanovic dengan judul *The Religious Diplomacy of the Russian Federation*. Tulisan yang dipublikasikan pada Juni 2012 ini membahas tentang kebangkitan nilai-nilai keagamaan di Rusia pasca perang dingin dan digunakan sebagai acuan dalam pembentukan kebijakan luar negeri serta pembentukan kembali nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan politik dan sosial domestik Rusia.

Dalam kasus negara dengan status *post-socialist*, menemukan kembali tentang agama berarti mendapatkan kembali kebudayaan yang terlupakan, sejarah dan rekonstruksi identitas nasional. Republik Soviet merupakan contoh yang tepat untuk fenomena ini. Salah satu manifestasi dari kebangkitan agama di lingkungan masyarakat Rusia adalah peningkatan kesatuan aktivitas antara negara dengan organisasi keagamaan di area internasional. Tradisi orang Rusia dalam penggunaan institusi agama untuk kebijakan negara, termasuk untuk diplomasi tidak dapat terlepas dari sejarah panjang Rusia.

Kesamaan tulisan ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah tentang nilai-nilai agama dan diplomasi agama yang tidak hanya bertindak sebagai faktor dalam penentuan kebijakan luar negeri tetapi dapat juga bertindak sebagai identitas nasional suatu negara. Selain itu hal ini juga berpengaruh pada kehidupan sosial politik dalam negeri itu sendiri. Dalam tulisan ini disebutkan bahwa Pemerintah Federasi Rusia telah membentuk diplomasi agama (penggunaan agama dalam kebijakan luar negeri) dan telah berkembang secara efisien. Hal ini merupakan indikator yang tepat dalam memecahkan masalah krisis identitas dan nilai yang berhubungan dengan kehidupan politik dan sosial. Menurut kebanyakan orang Rusia, termasuk para elit politik, agama merupakan pondasi dari nilai-nilai untuk perbaikan sosial Rusia secara spiritual dan untuk mendapatkan kembali “*power status*”. Disebutkan juga bahwa proses internal ini merupakan konsekuensi yang akan diterima oleh aktivitas eksternal dan diplomasi agama yang menjadi bagian dari fenomena penyesuaian antara Gereja dan negara yang lebih luas di Rusia.

3. METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif. Bungin berpendapat, “Penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk meneliti masalah-masalah yang membutuhkan studi mendalam yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di

masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu.” (Bungin, 2007).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data skunder, yakni data yang diperoleh secara tidak

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Persamaan Kultur yang Dimiliki oleh Indonesia dan Filipina Selatan

Terdapat persamaan corak keberadaan Islam di negara-negara di kawasan Asia Tenggara, khususnya di Indonesia dan Filipina selatan yang membentuk adanya persamaan nilai atau membentuk sebuah *shared identity* yakni adanya persamaan sejarah masuk dan berkembangnya ajaran Islam melalui pedagang asing, adanya garis keturunan yang sama hasil dari dilakukannya proses asimilasi oleh pedagang asing dan penduduk setempat dengan jalan perkawinan, adanya penggunaan rumpun bahasa Austronesia dan adanya persamaan corak pendidikan Islam di negara-negara kawasan Asia Tenggara.

Adapun perbedaan corak Islam di kawasan Asia Tenggara yang membedakan dengan Islam di kawasan Timur Tengah adalah dilihat dari pola pendidikan Islam yakni adanya Pondok Pesantren di negara-negara kawasan Asia Tenggara yang tidak ada di kawasan lainnya. Pondok pesantren di

langsung atau melalui hasil pengolahan pihak lain. Data dikumpulkan melalui berbagai literatur, jurnal ilmiah dan media cetak dan elektronik yang berkaitan dengan penggunaan diplomasi agama oleh pemerintah Indonesia dalam upaya pembebasan sandera anak buah kapal Pandu Brahma 12 di Filipina tahun 2016. Data tersebut kemudian dianalisis dan disajikan secara sistematis melalui narasi teks, gambar, tabel dan bagan.

kawasan Asia Tenggara dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu dan Budha di masa lampau yakni kebudayaan yang disebut *Pasraman* yang diadopsi oleh para pendakwah Asia Tenggara. Dalam praktiknya, pola pendidikan pondok pesantren menggabungkan antara sistem asrama dan pendidikan Islam. Corak pendidikan ini telah dipraktikkan sejak lama dan luas di Asia Tenggara semenjak sebelum terbentuknya negara-negara modern (Anna, 2004). Di Indonesia dan Filipina selatan, pola pendidikan pondok pesantren telah lumrah dijalankan. Bahkan jaringan pondok pesantren antara Indonesia dengan Filipina selatan semakin menguat, hal ini ditunjukkan dengan adanya kegiatan pengajaran yang dilakukan oleh tokoh-tokoh pendidikan Islam dari Indonesia ke pondok pesantren yang terdapat di Filipina selatan.

Selain hal-hal tersebut, terdapat sebuah indikator yang semakin menguatkan kesamaan dan kedekatan penduduk Islam yang berada di negara-negara kawasan Asia Tenggara yakni dengan adanya aksi dan

gerakan kolektif Islam radikal di negara-negara tersebut. Sejak dua dekade terakhir tepatnya sejak tahun 2000, dunia internasional menyaksikan kebangkitan radikalisme Islam di Asia Tenggara. Selain kelompok Abu Sayyaf di Filipina selatan yang terlibat dalam sejumlah aksi penyanderaan warga negara asing, radikalisme juga terjadi di Malaysia dan Indonesia yakni ditandai dengan munculnya sejumlah organisasi Islam seperti Forum Komunikasi Ahlus Sunnah Wal Jamaah (FKASWJ), Front Pembela Islam (FPI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dan lain-lain (Hiariej, 2016, p. 1).

Shared identity yang terbentuk antara Indonesia dan Filipina selatan merupakan suatu dasar atau acuan dalam pola hubungan antar kedua negara karena menurut Mattern, salah satu sumber dari tatanan politik internasional adalah identitas. Namun selama ini para praktisi telah salah menggunakan sebuah konsensus yang menyatakan bahwa sumber tatanan politik internasional ada dua yakni kekuatan politik dan kesamaan kepentingan. Secara analisis menunjukkan bahwa baik kekuatan politik (*power politics*) maupun kesamaan kepentingan (*common interests*) bukan merupakan sumber tatanan, melainkan hanya sebagai faktor yang berkontribusi dalam tatanan politik internasional. Kedua faktor tersebut tidak mampu menciptakan kestabilan dan tidak mampu membentuk kesamaan ekspektasi serta kebiasaan karena faktor-faktor tersebut bergantung pada sesuatu yang

lebih utama. Tertutupnya anggapan bahwa kekuatan politik dan kesamaan kepentingan merupakan faktor yang berkontribusi dalam tatanan politik internasional bukan sebagai sumber telah menunjukkan bahwa studi hubungan internasional selama ini telah secara tidak sengaja menyesatkan para praktisi mengenai kebijakan yang paling manjur untuk merealisasikan visi tatanan politik internasional yang ideal (Mattern, 2005, pp. 3-4).

Jika dikaitkan dengan upaya pembebasan sandera anak buah kapal yang berwarga negara Indonesia oleh ASG¹ di Filipina, pola hubungan keduanya secara umum akan menggunakan pendekatan formal melalui mediasi ataupun pendekatan militer. Kedua negara umumnya akan saling menunjukkan *power* dalam upaya pembebasan tersebut. Filipina sebagai negara tujuan pembebasan akan menutup akses bagi militer Indonesia untuk masuk ke dalam wilayah kedaulatannya, namun Indonesia memerlukan *power* nya untuk menyelamatkan warga negaranya. Hal inilah yang melatarbelakangi penggunaan pendekatan non-militer.

Selain adanya benturan kekuasaan dalam wilayah berdaulat, adapun faktor-faktor lain yang menyebabkan Indonesia untuk mengesampingkan opsi militer dalam upaya pembebasan sandera. Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan

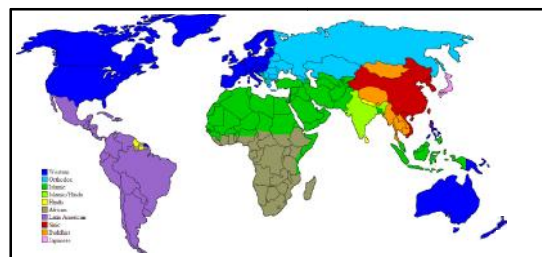
¹Abu Sayyaf Group (ASG) : Kelompok Abu Sayyaf

Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan, opsi militer dikesampingkan karena pemerintah Indonesia banyak menerima laporan mengenai medan dan lokasi para sandera yang cukup sulit jika melakukan pembebasan. Selain hal tersebut, adanya perbedaan perlakuan yang diterima oleh sandera WNA (Warga Negara Asing) dan WNI (Warga Negara Indonesia) yakni eksekusi yang dilakukan pada WNA yang dalam tenggang waktu yang dilakukan tidak kunjung membayar uang tebusan oleh ASG, sedangkan sandera WNI telah beberapa kali diberikan tenggang waktu yang berbeda untuk membayar uang tebusan, dianggap sebagai celah untuk menggunakan pendekatan lain.

Pengesampingan opsi militer oleh Indonesia didasari oleh kesadaran akan kesamaan yang dimiliki oleh kedua pihak yang dalam hal ini kesamaan nilai yang dimiliki oleh Indonesia dan ASG di Filipina selatan. Janice berpendapat bahwa satu sumber tatanan politik internasional adalah identitas. Lebih luas lagi, identitas mengacu pada aspek kognitif, sosiologi, emosi dan aspek *nontangible* lain pada suatu negara yang mendasari peran sebuah negara dalam hubungan internasional (Ashmore & Jussim, 1997). Dalam hal ini, identitas internasional sama dengan kesamaan pemahaman antarnegara—pemahaman intersubjektif—mengenai situasi relatif satu negara dengan negara lain. Setiap negara dapat mengembangkan beberapa macam identitas terhadap negara lain, mulai dari kesamaan

paham positif (berteman) atau kesamaan paham negatif (bermusuhan) (Wendt, 1999).

Identitas internasional sebagai suatu sumber tatanan politik internasional berkaitan erat dengan teori yang dikemukakan oleh Samuel P. Huntington yang membagi dunia dalam beberapa peradaban seperti pada gambar di bawah ini.



Dalam peta persebaran peradaban yang digambarkan oleh Huntington, nampak bahwa antara Indonesia dan Filipina selatan memiliki warna yang sama yakni warna hijau tua yang mewakili peradaban Islam atau *Islamic World*. Huntington memetakan peradaban berdasarkan mayoritas penduduk yang menghuni wilayah tersebut, bukan berdasarkan persebaran secara negara bangsa. Baik Indonesia secara mayoritas maupun Filipina selatan memiliki kesamaan sejarah dalam masuk dan berkembangnya peradaban Islam yang mendominasi. Selain itu adanya gerakan dan aksi kolektif kelompok Islam radikal di kedua negara justru membenarkan pemetaan oleh Huntington yang mana secara praktis, dalam wilayah kedua negara terdapat kesamaan pemahaman, kebiasaan dan harapan atau ekspektasi yang mampu membuat pola

hubungan keduanya menjadi paham positif (berteman). Hal inilah yang melatarbelakangi pemilihan pendekatan kultural guna membebaskan sandera, dengan harapan agar pihak penyandera bersedia melakukan komunikasi dan negosiasi yang baik dalam satu payung besar sebagai umat Muslim.

4.2.1 Analisis Penggunaan Faktor Agama oleh Pemerintah Indonesia dalam Upaya Pembebasan Sandera

Pada fase awal negosiasi, pemerintah Indonesia mengambil posisi yang cukup keras, bahkan presiden Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membayar uang tebusan yang diminta. Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu bahkan sempat mengisyaratkan akan melakukan operasi militer untuk pembebasan. Kemudian terjadi peristiwa kegagalan operasi militer Filipina di Basilan. Dalam peristiwa tersebut, ASG berhasil menunjukkan kekuatannya dengan menewaskan 18 tentara Filipina. Hal inilah yang mengubah orientasi diplomasi Indonesia dalam upaya pembebasan sandera. Pada situasi seperti ini, memilih opsi militer merupakan opsi beresiko tinggi karena tidak mungkin untuk meminta kerjasama dengan militer Filipina karena ASG tidak akan mempercayai pihak militer Filipina yang baru saja menyerangnya (Indra, 2016).

Selama upaya pembebasan berlangsung, pemerintah Indonesia selalu berkoordinasi dengan pemerintah Filipina,

dengan bertukar informasi, nasehat, strategi dan asistensi. Pemerintah Filipina melakukan upaya bersama dan memberikan dukungan sepenuhnya sehingga Indonesia tidak terlalu sulit dalam membuka ruang komunikasi dengan pihak penyandera. Secara formal, pembebasan sandera ABK Pandu Brahma 12 merupakan hasil kombinasi antara intelijen dan negosiasi dari para tokoh yang berjalan bersamaan. Operasi intelijen yang dilakukan bukanlah pengiriman militer namun dengan cara pengiriman penasehat dan negosiator yang dibagi menjadi tiga tim di bawah koordinasi Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi (Wangke, 2016, p. 6).

Tim pertama yang merupakan tim Yayasan Sukma Bangsa bentukan Surya Paloh yang melibatkan Ahmad Baedowi yakni seorang pengajar yang memiliki koneksi dengan pesantren-pesantren di Filipina selatan dan sempat mengajar di pesantren tersebut. Baedowi menerima panggilan telepon langsung dari Al-Habsi yakni pimpinan kelompok penyandera yang kemudian bertemu bersama dengan Desi Fitriani selatan kota Jolo, Sulu. Al-habsi kemudian meminta mahar berupa Al-Quran seberat 40kg (yakni berjumlah 25 buah setelah ditimbang). Pada tanggal 30 April 2016, tim Yayasan Sukma menerima kabar bahwa sandera akan dibebaskan. Negosiasi berhasil dilakukan karena Ahmad Baedowi merupakan pengajar dan memiliki beberapa jaringan pondok pesantren di Filipina Selatan.

Tim kedua adalah tim yang melibatkan Nur Misuari, seorang tokoh agama sekaligus mantan pimpinan kelompok MNLF di Filipina selatan. Kelompok ini dipimpin oleh Kivlan Zen dengan 7 orang yang merupakan bagian dari operasi intelijen Indonesia yang bekerjasama dengan intelijen Filipina serta termasuk negosiastor yang berasal dari perusahaan pemilik kapal. Koneksi dan komunikasi dengan Nur Misuari dibuka oleh Kivlan Zen karena keduanya pernah terlibat dalam perdamaian saat genjatan senjata dengan pemerintah Filipina dan kebetulan bahwa Al-Habsi merupakan mantan supir Nur Misuari. Setelah komunikasi dari pihak Nur Misuari terjalin dan tim Yayasan Sukma sudah menemui Al-Habsi, pada tanggal 1 Mei 2016 akhirnya ke 10 sandera berhasil dilepaskan dan dibawa ke rumah Gubernur Sulu yakni Abdusakur Toto Tan II yang merupakan keponakan Nur Misuari untuk dijamu makan minum dan diberikan pakaian.

Tim yang ketiga adalah tim bentukan Jusuf Kalla yang menugaskan Hamid Awaludin untuk mengurus kondisi para sandera melalui jalur komunikasi Palang Merah Internasional dan Palang Merah Filipina. Selain jalur formal, adanya jalur informal yang ditempuh oleh tim ini adalah komunikasi yang melibatkan seorang yang memiliki jaringan dengan kelompok Moro yakni Agus Dwikarna yakni seorang mantan teroris yang dipenjarakan di Filipina selama 11 tahun (Tempo, 2016). Pelibatan Agus Dwikarna merupakan salah satu bentuk

dihadirkannya tokoh yang memiliki *shared identity* yang sama dengan pihak penyandera.

5. KESIMPULAN

Bentuk dari upaya pembebasan sandera oleh pemerintah Indonesia melalui pengiriman tokoh-tokoh negosiator dan dengan menggunakan faktor agama merupakan sebuah langkah yang efektif dan efisien karena negara saat ini tidak lagi menjadi aktor yang paling berpengaruh dalam diplomasi kontemporer. Kapasitas negara dalam melakukan diplomasi sering kali bersifat terbatas. Untuk menyikapinya, masyarakat sipil dapat mengambil alih proses diplomasi tersebut. Adapun yang membedakan negosiasi tim warga sipil dan negosiasi negara adalah tim warga sipil dapat langsung menasar ke lembaga dan pihak yang terlibat serta tim negosiasi dapat dengan leluasa membuat penawaran kepada lawannya, hal ini terkait dengan kreativitas para negosiator karena dalam negosiasi negara, penawaran yang diberikan cenderung bersifat kaku (Indra, 2016).

Selain itu keberhasilan pembebasan sandera oleh pemerintah Indonesia dengan menggunakan faktor agama dan melalui jalur negosiasi dapat memberikan beberapa dampak positif bagi Indonesia itu sendiri. Selain menekan resiko korban dan kerugian, keberhasilan ini dapat membentuk citra Indonesia sebagai negara yang mengedepankan jalur-jalur damai dalam proses resolusi konflik. Dampak positif lain

dari keberhasilan ini adalah dapat menempatkan agama sebagai faktor yang dapat diperhitungkan dalam proses penyelesaian konflik terutama yang melibatkan negara dengan kultur yang sama.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anna, M. G. (2004). *Perfection Makes Practice: Learning, Emotion and the Recited Qur'an in Indonesia*. Hawaii: University of Hawaii Press.
- Ashmore, R., & Jussim, L. (1997). *Self and Identity: Fundamental Issues*. New York: Oxford University Press.
- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif* (2nd ed.). Jakarta: Prenada Media Group.
- Mattern, J. B. (2005). *Ordering International Politics: Identity, Crisis and Representational Force*. New York: Routledge.
- Wendt, A. (1999). *Social Theory of International Politics*. Cambridge, England: Cambridge University Press.

Jurnal Artikel

- Banlaoi, R. C. (2008). Al-Harakatul Al Islamiyyah, Essay on the Abu Sayyaf Group.
- Curanovic, A. (2012, June). The Religious Diplomacy of the Russian Federation. *IFRI Journal*, 3-27. Retrieved from <https://www.ifri.org/sites/default/.../ifrir/nr12curanovicreligiousdiplomacyjune2012.pdf>
- Hiariej, E. (2016). Aksi dan Gerakan Kolektif Islam Radikal di Indonesia. *e-journal UGM*.
- Huntington, S. P. (1993). The Clash of Civilizations? *Foreign Affairs* 72, no 3.

Tadloui, G. (2015, February). Morocco's Religious Diplomacy in Africa. *FRIDE Journal*, 1-5. Retrieved from http://fride.org/download/PB196_Morocco_religious_diplomacy_in_Africa.pdf

Tempo. (2016). Mahar Paman Pelepas Sandera. *Majalah Tempo*.

Wangke, H. (2016, Mei 2010). Keberhasilan Diplomasi Total. *Kajian Singkat terhadap Isu Aktual & Strategis*, VIII, pp. 5-8.

Website

- Indra, P. A. (2016, Juli 22). *Karena Diplomat adalah Kita*. Retrieved from Tirto: <https://tirto.id/karena-diplomat-adalah-kita-bjqp>
- Natgeo. (2016, May 2). *Lika-liku Pembebasan WNI yang Disandera Kelompok Abu Sayyaf*. Retrieved from National Geographic Indonesia: <http://nationalgeographic.co.id/berita/2016/05/likaliku-pembebasan-wni-yang-disandera-kelompok-abu-sayyaf>
- Ruqoyah, S., & Nadlir, M. (2016, Juli 16). *Ini Sebab TNI Belum Bisa Dikerahkan untuk Membebaskan Sandera*. Retrieved from Viva News: <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/797197-ini-sebab-tni-belum-bisa-dikerahkan-untuk-bebaskan-sandera>
- Siswoyo, H. (2016, Mei 2). *5 Fakta di Balik Pembebasan Sandera Abu Sayyaf*. Retrieved from Viva News: <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/767698-5-fakta-di-balik-pembebasan-sandera-abu-sayyaf>
- Wicaksono, B. A., & Dono, D. (2016, Mei 3). *Ketakutan Landa WNI saat Sandera Kanada Dipenggal Abu Sayyaf*. Retrieved from Viva News: <http://metro.news.viva.co.id/news/read/768511-ketakutan-landa-wni-saat-sandera-kanada-dipenggal-abu-sayyaf>

